



Article Informations

Corresponding Email:

itsmerenanda@gmail.com

Received: 13/02/2025; Accepted:

15/02/2025; Published: 30/06/2025

FAKTOR PENDORONG AUSTRALIA DALAM MENJALIN KERJA SAMA DENGAN NAURU TERKAIT ISU PENANGGULANGAN IMIGRAN ILEGAL TAHUN 2022-2024

**Renanda Maharani Aisha¹⁾, Angga Nurdin Rachmat²⁾, Nala Nourma
Nastiti³⁾**

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kebijakan Operation Sovereign Borders merupakan upaya Australia dalam menangani imigrasi ilegal, yang menekankan kerja sama dengan Nauru. Isu utama dalam analisis ini berkaitan dengan faktor-faktor yang memotivasi Australia untuk mempertahankan kerja sama ini selama periode 2022-2024, terlepas dari pengawasan internasional yang dihadapinya. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kecenderungan Australia untuk mempertahankan kebijakan ini melalui perspektif realisme neoklasik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang melibatkan analisis dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan keamanan, dinamika politik internal, dan lanskap geopolitik yang kompetitif di kawasan Pasifik. Kebijakan ini berupaya untuk mengatur migrasi sekaligus meningkatkan posisi Australia dalam konteks regional.

Kata Kunci: Australia, Nauru, Imigran Ilegal, kebijakan luar negeri Australia.

Abstract

The Operation Sovereign Borders policy represents Australia's primary approach to addressing illegal immigration, emphasising collaboration with Nauru. The central issue in this analysis pertains to the elements that motivate Australia to sustain this collaboration during the period of 2022-2024, notwithstanding the international scrutiny it faces. This research endeavours to examine Australia's inclination to uphold this policy through the lens of neoclassical realism. The approach employed is descriptive qualitative, involving an analysis of policy documents, official reports, and scholarly literature. The findings indicate that this collaboration is motivated by considerations of security, internal political dynamics, and the competitive geopolitical landscape in the Pacific region. This policy seeks to regulate migration while simultaneously enhancing Australia's standing within the regional context.

Keywords: Australia, Nauru, Illegal Immigrants, foreign policy

PENDAHULUAN

Isu imigrasi ilegal telah menjadi tantangan global yang kompleks dan berkelanjutan. Australia, sebagai salah satu negara tujuan utama bagi pencari suaka, telah menerapkan kebijakan ketat dalam menangani arus imigran ilegal, termasuk melalui program *Operation Sovereign Borders* (OSB). Salah satu elemen utama dari kebijakan ini adalah kerja sama dengan Nauru dalam pengelolaan pusat pemrosesan pencari suaka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan arus migrasi dan menjaga keamanan nasional Australia, namun juga menimbulkan berbagai kontroversi di tingkat internasional terkait dengan aspek hak asasi manusia. Dengan meningkatnya tekanan internasional serta perubahan dinamika politik dalam negeri, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong Australia untuk terus mempertahankan kerja sama ini selama periode 2022-2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Apa faktor pendorong Australia dalam menjalin kerja sama dengan Nauru terkait isu penanggulangan imigran ilegal pada tahun 2022-2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia, baik dari sisi kepentingan nasional, tekanan internasional, maupun dinamika geopolitik di kawasan Pasifik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme neoklasik sebagai kerangka teori utama. Menurut realisme neoklasik, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk persepsi elite politik, dinamika domestik, serta struktur sistem internasional. Dalam konteks kerja sama Australia-Nauru, teori ini membantu menganalisis bagaimana kebijakan migrasi Australia tidak hanya didorong oleh ancaman eksternal, tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan ekonomi domestik. Selain itu, konsep kebijakan luar negeri adaptif oleh James Rosenau akan digunakan untuk memahami bagaimana Australia menyesuaikan kebijakan OSB terhadap tekanan internasional dan perubahan lingkungan strategis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah Australia dan Nauru, jurnal akademik, serta publikasi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan *Amnesty International*. Teknik analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memastikan akurasi serta relevansi informasi yang dikumpulkan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong keberlanjutan kerja sama Australia dan Nauru dalam penanganan imigran ilegal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan migrasi Australia serta dampaknya dalam konteks hubungan internasional di kawasan Pasifik.

PEMBAHASAN

1. Faktor Internal: Stabilitas Politik dan Kepentingan Keamanan Nasional

Australia memandang migrasi ilegal sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, sehingga kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB) tetap dipertahankan meskipun terdapat kritik dari komunitas internasional. Salah satu faktor utama yang mendorong keberlanjutan kebijakan ini adalah kepentingan domestik Australia dalam menjaga kontrol perbatasannya. Dengan meningkatnya arus pencari suaka yang menggunakan jalur laut, pemerintah Australia melihat perlu adanya langkah pencegahan yang tegas untuk memastikan bahwa negara tetap memiliki kendali penuh terhadap siapa yang boleh masuk ke wilayahnya (Jasmin, 2023:10).

Dalam teori Realisme Neoklasik, kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor domestik, termasuk persepsi pemerintah dan elit politik terhadap ancaman eksternal (Rose, 1998:146). Dalam konteks ini, kebijakan OSB dapat dipahami sebagai strategi Australia untuk menanggapi tekanan domestik terkait isu imigrasi ilegal. Persepsi publik terhadap pencari suaka sering kali dikaitkan dengan meningkatnya

kriminalitas dan beban ekonomi, sehingga mendukung penerapan kebijakan yang lebih ketat (Rianto, 2020:12).

Selain aspek keamanan, stabilitas politik dalam negeri juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan ini. Sejak kemenangan Partai Buruh pada 2022 di bawah kepemimpinan Anthony Albanese, kebijakan imigrasi tetap menjadi isu politik yang sensitif. Meskipun Partai Buruh secara historis lebih moderat dalam kebijakan migrasi, tekanan dari kelompok konservatif dan oposisi membuat kebijakan OSB tidak dapat dihapuskan begitu saja (Hudan, 2021:14). Keberlanjutan kebijakan ini juga merupakan bentuk respons terhadap opini publik yang mayoritas mendukung langkah tegas terhadap imigran ilegal.

Kebijakan OSB juga berkaitan erat dengan konsep kebijakan luar negeri adaptif, yang dikemukakan oleh James Rosenau. Konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sering kali beradaptasi dengan kondisi domestik dan dinamika internasional yang berubah. Dalam konteks ini, meskipun pemerintahan Albanese memiliki pendekatan yang lebih lunak terhadap isu hak asasi manusia, faktor politik dalam negeri tetap memaksanya untuk mempertahankan kebijakan OSB sebagai langkah strategis dalam mengontrol arus migrasi ilegal (Rosenau, 1987:8).

2. Faktor Eksternal: Tekanan Internasional dan Geopolitik di Pasifik

Selain faktor domestik, kebijakan OSB juga dipertahankan karena dinamika geopolitik di kawasan Pasifik. Australia melihat peningkatan pengaruh China di negara-negara kepulauan Pasifik sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Dengan menjalin kerja sama dengan Nauru dalam kebijakan OSB, Australia tidak hanya menangani isu imigrasi ilegal, tetapi juga memperkuat pengaruhnya di kawasan (Hudan, 2021:17).

Dalam konsep interdependensi asimetris, hubungan Australia dan Nauru menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang. Nauru sangat bergantung pada bantuan finansial dari Australia, di mana sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara

tersebut berasal dari dana yang terkait dengan pusat pemrosesan pencari suaka (IMF, 2023). Ketergantungan ini memberikan keuntungan bagi Australia, karena menjadikan Nauru sebagai mitra yang dapat dikendalikan dalam implementasi kebijakan OSB.

Australia juga menghadapi tekanan dari organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan UNHCR, yang mengkritik kebijakan OSB sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun, pemerintah Australia berargumen bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem pencari suaka dan memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar membutuhkan perlindungan yang mendapatkan akses ke sistem imigrasi Australia (Jasmin, 2023:20).

Selain itu, kerja sama dengan Nauru dalam kebijakan OSB juga merupakan bagian dari strategi Australia untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan keterlibatannya di negara-negara Pasifik melalui investasi infrastruktur dan bantuan ekonomi. Australia melihat pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan negara-negara kecil seperti Nauru untuk memastikan bahwa kawasan tersebut tetap berada dalam orbit geopolitiknya (Rianto, 2020:22).

3. Leadership Role: Peran Pemerintahan Anthony Albanese dalam Mempertahankan OSB

Kepemimpinan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan OSB. Anthony Albanese, meskipun berasal dari Partai Buruh yang cenderung lebih moderat dalam isu migrasi, tetap mempertahankan kebijakan ini karena tekanan domestik dan internasional. Dalam teori Realisme Neoklasik, keputusan politik luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural global, tetapi juga oleh faktor persepsi pemimpin terhadap situasi yang dihadapi (Rose, 1998:150).

Albanese menghadapi dilema politik dalam mempertahankan kebijakan OSB. Di satu sisi, ia harus menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab Australia dalam perlindungan pencari suaka. Namun, di sisi lain, ia juga harus menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan tidak memberikan celah bagi oposisi untuk mengeksplorasi isu imigrasi sebagai alat kampanye politik (Hudan, 2021:25).

Dalam konteks hubungan bilateral dengan Nauru, pemerintahan Albanese memastikan bahwa kerja sama ini tetap berjalan dengan memberikan bantuan ekonomi yang lebih besar kepada negara tersebut. Pada 2023, Australia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) baru dengan Nauru yang memastikan pendanaan berkelanjutan bagi pusat pemrosesan pencari suaka. Perjanjian ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan legitimasi bagi kebijakan OSB dalam menghadapi kritik internasional (Jasmin, 2023:28).

Selain itu, kebijakan OSB di bawah pemerintahan Albanese mengalami beberapa modifikasi untuk mengurangi tekanan internasional. Salah satunya adalah peningkatan standar fasilitas di pusat pemrosesan Nauru serta penekanan pada program pemukiman kembali bagi pencari suaka yang memenuhi syarat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa kebijakan ini lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan, meskipun pada dasarnya tetap mempertahankan prinsip utama OSB (Rianto, 2020:30).

Keberlanjutan kebijakan OSB di bawah pemerintahan Albanese menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Australia. Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Albanese tetap mempertahankan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi politik domestik dan kepentingan geopolitik di kawasan Pasifik. Dengan demikian, kebijakan OSB tidak hanya mencerminkan kepentingan keamanan nasional Australia, tetapi juga dinamika kompleks yang melibatkan faktor domestik, internasional, dan kepemimpinan politik.

KESIMPULAN

Kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB) tetap menjadi strategi utama Australia dalam menangani imigrasi ilegal, khususnya melalui kerja sama dengan Nauru sebagai pusat pemrosesan pencari suaka. Analisis menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan ini didorong oleh tiga faktor utama: kepentingan domestik dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik, dinamika geopolitik di kawasan Pasifik, serta peran kepemimpinan Anthony Albanese dalam menyesuaikan kebijakan dengan berbagai tekanan. Dengan menggunakan perspektif Realisme Neoklasik, penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan OSB tidak hanya merupakan respons terhadap tantangan global, tetapi juga hasil dari kalkulasi politik dalam negeri yang mempertimbangkan opini publik dan kepentingan strategis Australia.

Dari faktor eksternal, kerja sama dengan Nauru tidak hanya membantu Australia mengontrol arus pencari suaka tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Pasifik, terutama dalam menghadapi meningkatnya pengaruh China. Meskipun mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia, pemerintah Australia mempertahankan kebijakan ini dengan alasan keamanan dan pencegahan eksplorasi pencari suaka oleh sindikat penyelundupan manusia. Di sisi lain, kepemimpinan Anthony Albanese memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan OSB dengan melakukan beberapa modifikasi, seperti peningkatan standar fasilitas di pusat pemrosesan, guna mengurangi tekanan internasional tanpa mengubah prinsip utama kebijakan ini.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Australia bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, OSB tetap dipertahankan karena dianggap efektif dalam menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan kepentingan regional Australia. Ke depan, perubahan dinamika politik domestik dan hubungan internasional akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kebijakan ini akan terus berlanjut atau mengalami perubahan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. Australia: Refugee Crisis under Offshore Detention Policy Continues. Amnesty International Publications, 2023.
- Australian Department of Home Affairs. Operation Sovereign Borders: Annual Report 2022-2023. Government of Australia, 2023.
- Hudan, Rheeno Hamdani. "Kontradiksi Operation Sovereign Borders Australia terhadap Peratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951." *Jurnal Hubungan Internasional Global*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 14-29.
- International Monetary Fund (IMF). Economic Outlook Report for Pacific Islands, with a Focus on Australia and Nauru. IMF Publications, 2023.
- Jasmin, Irena Kusuma. "Kebijakan Operation Sovereign Borders dalam Menjaga Keamanan Nasional Australia." *Jurnal Keamanan Global*, vol. 12, no. 3, 2023, pp. 10-25.
- Parliament of Australia. Inquiry into Australia's Border Protection Policies and Regional Processing Arrangements. House of Representatives, 2023.
- Rianto, Oren. "Proses Pengambilan Kebijakan Australia dalam Operation Sovereign Borders serta Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement dalam Menanggulangi People Smuggling." *Jurnal Politik Internasional*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 12-26.
- Rose, Gideon. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Princeton University Press, 2016.
- Rosenau, James N. The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges. Routledge, 2017.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Report on the Human Rights Impact of Australia's Offshore Processing Policy. UNHCR, 2022.